

**PENGARUH GENDER, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN
RELIGIUSITAS TERHADAP PERSEPSI
PENGGELAPAN PAJAK**

Oleh :

Lasmia Dharma

Pembimbing : Restu Agusti dan Pipin Kurnia

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : lasmia.dharma@gmail.com

*The Effect of Gender, Tax Knowledge, and Religiosity
to the Perception of Tax Evasion*

ABSTRACT

This study aimed to determine the influence of gender, tax knowledge, and religiosity to the perception of tax evasion. Independent variables used in this study are gender, tax knowledge, and religiosity, while the dependent variable in this study is the perception of tax evasion. Populations used in this study is questionnaire, where the total population is used 125 students. The sampling technique used was purposive sampling technique in which the number of observations obtained this study was 45 (15x3). Data analysis conducted with multiple regression model with help of software SPSS version 20,0. Of the result of the testing that has been done, the partial regression test (t test) showed that the independent variables gender positive influence, tax knowledge negative influence, religiosity not influence. By variables gender, tax knowledge, and religiosity in this research can explain 48,2% the perception of tax evasion and the other 51,8% explain by other variable.

Keywords: gender, tax knowledge, religiosity, and the perception of tax evasion

PENDAHULUAN

Dalam rangka memajukan ke-sejahteraan segenap masyarakat Indonesia, pemerintah memiliki berbagai program pembangunan nasional. Untuk itu, dibutuhkan suatu anggaran penerimaan dan pengeluaran setiap tahunnya dan hal ini tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di dalam APBN, terdapat dua jenis sumber penerimaan negara, yaitu penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional serta

penerimaan bukan pajak. Sumber dana yang memberikan proporsi terbesar terhadap penerimaan negara adalah dari sektor perpajakan. Menurut Mardiasmo (2009) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Suminarsasi (2011) Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktek penggelapan pajak

yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berbagai macam statemen bermunculan, diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak.

Penelitian-penelitian mengenai persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagian besar baru mendiskusikan aspek-aspek teknis dari penggelapan pajak, seperti aspek hukum dan teknik penggelapan pajak. Etika penggelapan pajak masih jarang dibahas. Sering kali diskusi dimulai dengan premis bahwa apakah yang ilegal itu adalah tidak etis.

Penelitian terdahulu oleh McGee dan Guo (2007) di pandang dari segi persepsi maka etika penggelapan pajak berkaitan dengan *gender* (jenis kelamin) dari wajib pajak yang melakukan *Tax Evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh finance.com, menyatakan bahwa pegawai pajak dalam pemerintahan Indonesia 76% adalah laki-laki dan 24% perempuan.

Dalam sisi psikologi untuk memberikan penilaian terhadap etis/tidaknya suatu tindakan, maka laki-laki dan perempuan akan memberikan penilaian yang berbeda termasuk dalam kasus penggelapan pajak.

Rahman (2013) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan

data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Maka, seharusnya seorang yang lebih memahami pajak akan mengetahui aturan perpajakan yang lebih baik, namun dari fakta yang ada kita melihat kenyataan bahwa dari enam orang yang melakukan penggelapan pajak empat diantaranya adalah orang pajak itu sendiri.

Aspek etika atas penggelapan pajak dari perspektif agama dan sekuler (duniawi) adalah isu terbaru yang masuk dalam pertimbangan pengambilan persepsi oleh wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Cohn (1998) dalam McGee (2008) memeriksa literatur Yahudi dan menyimpulkan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis.

Salah satu alasan untuk kesimpulan ini karena ada tekanan pemikiran di dalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak, hal itu akan membuat semua orang Yahudi lainnya terlihat buruk.

McGee dan Ho (2005) mensurvei mahasiswa akuntansi, bisnis dan ilmu ekonomi di Hong Kong. Mereka menemukan mahasiswa akuntansi lebih bertentangan terhadap penggelapan pajak secara signifikan dibandingkan dengan mahasiswa bisnis dan ilmu ekonomi. McGee dan Guo pada tahun 2007 mensurvei mahasiswa hukum, ekonomi dan filsafat di Hubei. Mereka menemukan bahwa mahasiswa hukum lebih bertentangan secara signifikan terhadap penggelapan pajak dibandingkan dua kelompok lainnya. (Suminarsasi, 2011)

Dari tinjauan beberapa literatur mengenai etika dalam penggelapan

pajak di atas, menunjukkan bahwa penggelapan pajak bisa saja dianggap etis jika dikaitkan dalam kondisi atau alasan tertentu. Hasil penelitian lainnya juga menemukan bahwa persepsi terhadap etika penggelapan pajak berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dan dalam hal ini pembagian kelompok tersebut berdasarkan disiplin ilmu.

McGee dan Ho (2005) mensurvei mahasiswa akuntansi, bisnis dan ilmu ekonomi HongKong. Mereka menemukan mahasiswa akuntansi lebih berten-tangan terhadap penggelapan pajak secara signifikan dibandingkan dengan mahasiswa bisnis dan ilmu ekonomi.

McGee dan Guo pada tahun 2007 mensurvei mahasiswa hukum, eko-nomi dan filsafat di Hubei. Mereka menemukan bahwa mahasiswa hukum lebih bertentangan secara signifikan terhadap penggelapan pajak dibandingkan dua kelompok lainnya.

Dari tinjauan beberapa literatur mengenai etika dalam penggelapan pajak di atas, menunjukkan bahwa penggelapan pajak bisa saja dianggap etis jika dikaitkan dalam kondisi atau alasan tertentu. Hasil penelitian lainnya juga menemukan bahwa persepsi terhadap etika penggelapan pajak berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dan dalam hal ini pembagian kelompok tersebut berdasarkan disiplin ilmu.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1)Apakah pengaruh *Gender* terhadap Persepsi Penggelapan pajak? 2) Apakah pengaruh Pemahaman Perpajakan, terhadap Persepsi Penggelapan pajak 3) Apakah pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Penggelapan pajak?

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1)Menguji pengaruh *Gender* terhadap Persepsi Penggelapan pajak perbedaan persepsi mahasiswa ekonomi, hukum, dan psikologi mengenai etika penggelapan pajak. 2)Menguji pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan pajak. 3) Menguji pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Penggelapan pajak.

TELAAH PUSTAKA

Etika Penggelapan Pajak

Etika mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah: “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok”. Seperti penggunaan istilah etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Selain itu, kita menggunakan istilah akuntansi ketika mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tindakan professional akuntan.

Untuk makna yang kedua, etika adalah “kajian moralitas.” Hal ini berarti etika berkaitan dengan moralitas. Meskipun berkaitan, etika tidak sama persis dengan moralitas.

Etika adalah semacam penelaahan (baik aktivitas penelaahan maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri), sedangkan moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat (Suminarsasi, 2011).

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-

undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal.

Wajib Pajak melakukan berbagai cara menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan peraturan undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Penghindaran pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku disebut *Tax Evasion*. Tindakan ini dapat merugikan Negara, dan pelakunya akan dikenakan sanksi administrasi ataupun pidana sesuai dengan peraturan undang-undang yang ditetapkan. Sedangkan upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku (*lawful*) diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan yang baik disebut *Tax Avoidence* (Masri, 2012:1).

Gender

Pengertian dari *gender* yang ditemukan dalam kamus (Salsabila dan Hepi Prayudiawan, 2011) adalah penggolongan secara gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan keberadaan dua jenis kelaminserta ketiadaan jenis kelamin atau kenetralan.

Tang et al, (2000) menemukan bahwa karyawan laki-laki mementingkan uang dibandingkan perempuan. Beberapa penelitian menemukan bahwa perempuan lebih memiliki sikap etis dibandingkan dengan pria. Namun, beberapa studi lain mengemukakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara sikap etik yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan Coate dan Frey (2000), terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh *gender* terhadap perilaku etis maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi. Pendekatan struktural, menyatakan bahwa perbedaan antara pria dan wanita disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran lainnya. Sosialisasi awal dipengaruhi oleh reward dan insentif yang diberikan kepada individu di dalam suatu profesi.

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Resmi (2009) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) wajib pajak harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan (2) wajib pajak harus melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) baik masa maupun tahunan.

Religiusitas

Terdapat banyak istilah untuk menyebut agama seperti *religi*, *religion* (Inggris), *religie* (Belanda), *religio/relegare* (Latin) dan *ad-Dien* (Arab). Dalam bahasa Latin, kata *religio/religare* berarti mengikat. Dari pengertian agama inilah muncul istilah religiusitas yang berasal dari kata yang sama yaitu *religi* namun dalam implementasinya mempunyai makna yang berbeda. Clifford Geertz mengartikan agama sebagai (1) sebuah sistem symbol-simbol yang berlaku untuk (2) menetapkan

suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan tahan lama dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan (4) membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi itu nampak realistis.

Religiusitas adalah tingkat keterikatan individu dalam mengekspresikan ajaran-ajaran agama yang dianutnya dengan cara mengintegrasikan berbagai dimensi keagamaan yang ada kedalam kehidupan.

Menurut McDaniel dan Burnett, religiusitas merupakan suatu bentuk kepercayaan kepada Tuhan yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan-Nya. (Basri, 2004)

Kerangka Pemikiran Pengaruh Gender terhadap Persepsi Mahasiswa atas Penggelapan Pajak

Berdasarkan Coate dan Frey (2000), terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh *gender* terhadap perilaku etis maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi.

Pendekatan struktural, menyatakan bahwa perbedaan antara pria dan wanita disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran lainnya. Dalam hal menyikapi suatu perilaku penggelapan pajak maka laki-laki dan perempuan mempunyai jawaban yang berbeda. Perempuan cenderung menentang sikap yang ilegal daripada laki-laki.

Dalam penelitian McGee dan Guo (2007) berpendapat bahwa

perempuan akan lebih menentang penggelapan pajak daripada laki-laki.

Dari beberapa kasus penggelepan pajak dapat dilihat lebih dari setengah yang melakukan tindakan tersebut adalah laki-laki. Dalam sisi psikologi untuk memberikan penilaian terhadap etis atau tidaknya suatu tindakan, maka laki-laki dan perempuan akan memberikan penilaian yang berbeda termasuk dalam kasus penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Gender* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa atas Penggelapan Pajak

Pengaruh pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak, dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Tujuannya agar harapannya ke depan, praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan Wajib Pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan. Hardiningsih (2011) mengatakan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Tetapi faktanya tidak hanya wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak tetapi aparat pajak itu sendiri, yang kita ketahui memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang lebih baik dari wajib pajak. (Rahman, 2013).

McGee (2009) dalam penelitiannya mengaitkan sistem perpajakan dan pemahaman Undang-Undang perpajakan dapat berjalan dengan semestinya serta kemungkinan penyalahgunaan dalam sistem apapun. Mengacu pada teori persepsi, timbulnya persepsi oleh individu dipengaruhi oleh stimulus-stimulus, salah satunya pemahaman terhadap objek, dalam hal ini pemahaman perpajakan.

Wajib Pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik. Dari pernyataan diatas, dapat dikembangkan sebuah hipotesis mengenai pengaruh dari pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Mahasiswa atas Penggelapan Pajak

Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang Muslim, Religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.

Menurut Gordon Allport, seseorang yang mempunyai religiusitas ekstrinsik adalah orang yang menggunakan agamanya untuk mencapai tujuan mereka sendiri seperti orang yang pergi ke tempat

ibadah dengan tujuan untuk dilihat orang atau sebagai status sosial.

(Cohn, 1998; Tamari, 1998) menyimpulkan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis. Salah satu alasan untuk kesimpulan ini karena ada tekanan pemikiran di dalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak, hal itu akan membuat semua orang Yahudi lainnya terlihat buruk. Begitu juga dengan orang kristen (Mc. Gee and Guo, 2007).

Dari perspektif agama survei McGee (1998) pada sudut pandang Kristen menemukan bahwa mereka percaya kecurangan pajak menjadi tidak bermoral dalam setiap peristiwa dan situasi apa pun. (Basri, 2014).

Murtuza dan Ghazanfar (1998) membahas etika penggelapan pajak dari cara pandang Islam dan mengatakan penggelapan pajak itu bisa juga beretika, kalau dilihat dari kondisi sekarang yaitu masih belum banyak realisasi pemerintah yang diterapkan kepada masyarakat, hal ini yang membuat enggan masyarakat untuk membayar pajak. (Izza dan Hamzah: 2008).

Gagasan bahwa religiusitas seseorang (kereligiusan) dapat memengaruhi penilaian individu, keyakinan dan perilaku dalam berbagai situasi, akan muncul menjadi intuitif.

Religiusitas memiliki pengaruh baik pada sikap dan perilaku manusia. Religiusitas merupakan nilai penting dalam struktur kognitif individu Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi perilaku individu.

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Religiusitas berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini merupakan Mahasiswa Ekonomi, Hukum dan Psikologi di Universitas Riau, Universitas Islam Riau dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan penyebaran kuesioner.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji validitas dan uji realibilitas. Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas data, uji multukolinearitas, uji autkorelasi, dan uji heterokedstisitas. Metode analisis hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

1) Etika Penggelapan Pajak (Y)

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan doku-

men, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik atautkah jahat. Etika penggelapan pajak dalam hal ini menjelaskan konteks pengaruh terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi (2011). Variabel ini diukur dengan berdasarkan aspek keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, dengan 15 (lima belas) pertanyaan serta diukur dengan menggunakan skala likert (*likert scale*) yang berkaitan dengan 5 (lima) pilihan, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

2) Gender

Pengertian dari *gender* yang ditemukan dalam kamus (Salsabila dan Hapi Prayudiawan, 2011) adalah penggolongan secara gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan keberadaan dua jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin atau kenetralan.

Gender merupakan variabel *Dummy* dimana laki-laki dinyatakan dalam angka 1 dan perempuan dinyatakan dalam angka 0.

3) Pemahaman Perpajakan

Pemahaman ini berkaitan dengan seberapa jauh Wajib Pajak mengetahui Ketentuan Perpajakan

secara menyeluruh, meliputi segala aspek mulai dari pelaporan dan pembayaran pajak terutang.

Dalam melakukan pengukuran variabel menggunakan skala Likert skala 1 sampai 5 dengan perincian sebagai berikut: 1) Angka 1 = Tidak Paham, 2) Angka 2 = Kurang Paham, 3) Angka 3 = Cukup Paham, 4) Angka 4 = Paham, dan 5) Angka 5 = Sangat Paham.

4) Religiusitas

Religiusitas adalah tingkat keterikatan individu dalam mengekspresikan ajaran-ajaran agama yang dianutnya dengan cara mengintegrasikan berbagai dimensi keagamaan yang ada kedalam kehidupan atau religiusitas merupakan suatu bentuk kepercayaan kepada Tuhan.

Religiusitas merupakan variabel *Dummy* dimana muslim dinyatakan dengan 1 dan Non Muslim dinyatakan dalam angka 0.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Statistik deskriptif merupakan statistik penelitian yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambar data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran tentang suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum.

Tabel 1.
Deskriptif Statistik

	N	Min imu m	Max imu m	Mean	Std. Devia tion
Persepsi_Penggelapan_Pajak	100	37	62	46.75	5.461
Gender	100	0	1	.54	.501
Pemahaman_Pajak	100	54	75	60.94	7.006
Religiusitas	100	0	1	.68	.469
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil data olahan SPSS

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{tabel} dengan r_{hitung} . Nilai r_{tabel} pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 100 maka didapat r_{tabel} sebesar 0.1966. Nilai r_{tabel} yang diperoleh dibandingkan dengan nilai r_{hitung} dari data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner.

1) Pemahaman Perpajakan

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan

Butir Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0.474	0.1966	Valid
2	0.327	0.1966	Valid
3	0.546	0.1966	Valid
4	0.717	0.1966	Valid
5	0.686	0.1966	Valid
6	0.628	0.1966	Valid
7	0.690	0.1966	Valid
8	0.729	0.1966	Valid
9	0.697	0.1966	Valid
10	0.692	0.1966	Valid
11	0.705	0.1966	Valid
12	0.715	0.1966	Valid
13	0.687	0.1966	Valid
14	0.608	0.1966	Valid
15	0.596	0.1966	Valid
16	0.555	0.1966	Valid
17	0.315	0.1966	Valid

Sumber : Hasil Olahan SPSS 2015

2) Persepsi Penggelapan Pajak

Tabel 3.
Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak

Butir Pernyataan	Corrected Item- Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0.323	0.1966	Valid
2	0.422	0.1966	Valid
3	0.540	0.1966	Valid
4	0.549	0.1966	Valid
5	0.651	0.1966	Valid
6	0.657	0.1966	Valid
7	0.730	0.1966	Valid
8	0.714	0.1966	Valid
9	0.695	0.1966	Valid
10	0.671	0.1966	Valid
11	0.600	0.1966	Valid
12	0.560	0.1966	Valid
13	0.432	0.1966	Valid
14	0.397	0.1966	Valid
15	0.327	0.1966	Valid

Sumber: Hasil data Olahan SPSS 2015.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masing-masing butir pernyataan untuk variabel persepsi penggelapan pajak adalah $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan dalam pertanyaan variabel penggelapan pajak adalah valid dan layak digunakan sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Untuk pengujian reliabilitas penulis akan melihat dari nilai *cronbach alpha*. Jika nilai *cronbach alpha* besar dari 0,6 maka data yang digunakan dalam penelitian ini reliable, sebaliknya jika nilai alpha lebih rendah dari 0,60 maka nilai tersebut tidak reliable. Dengan bantuan program SPSS dapat dilihat hasil uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	17	0.922	Reliabel
Persepsi Penggelapan Pajak	15	0.890	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS 2015

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Untuk selanjutnya variabel-variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian statistik.

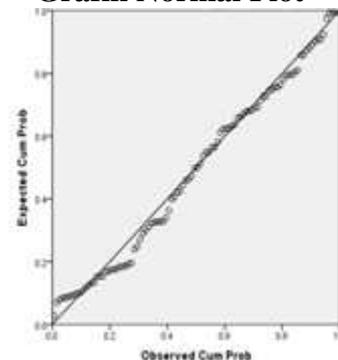
Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal.

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang digunakan dalam model regresi telah terdistribusi normal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 uji normalitas yaitu dengan grafik normal plot dan dengan uji Kolmogorov Smirnov.

Hasil dari grafik normal plot dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.
Grafik Normal Plot



Sumber : Data Olahan SPSS 2015

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal, sehingga dapat dikatakan

data berdistribusi normal, Kesimpulan ini didukung oleh hasil dari uji kolmogrov Smirnov.

Hasil Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas artinya antar-variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien kolerasinya tinggi atau bahkan 1).

Tabel5.

Nilai Tolerance dan VIF

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Gender	0.928	1.078	Bebas Multikolinieritas
Pemahaman Perpajakan	0.978	1.022	Bebas Multikolinieritas
Religiusitas	0.925	1.081	Bebas Multikolinieritas

Sumber : Data Olahan SPSS 2015

Berdasarkan tabel diatas dari ketiga variabel independen tersebut semua nilai *tolerance* berada diatas atau > 0.10 dan nilai VIF dibawah atau < 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari pengaruh multikolinieritas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel6.

Hasil Uji Autokorelasi

Nilai dW	Nilai dL	Nilai dU	4-dl	4-dU	Kesimpulan
1.961	1.6131	1.7364	2.3869	2.2636	Bebas Autokorelasi

Sumber : Data Olahan SPSS 2015

Berdasarkan tabel Durbin Waston diatas diketahui bahwa nilai DurbinWaston hitung sebesar 1.961.

Apabila dibandingkan dengan nilai Durbin-Waston tabel pada tingkat signifikan 5%, dengan $k=3$ dan $n=100$ maka diperoleh $d_l = 1.6131$ dan $d_u = 1.7364$, maka nilai $4-d_u = 2.2636$ dan nilai $4-d_l = 2.3869$. Hasil dari Durbin-Waston hitung sebesar 1.961 dan nilai ini berada diposisi antara d_u dengan $4-d_u$, yaitu antara 1.7364 dan 2.2636, yang artinya bahwa tidak adanya gejala autokorelasi dalam model regresi ini.

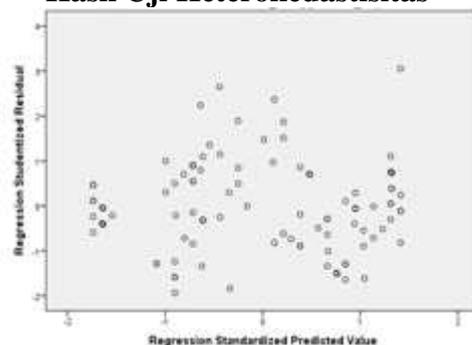
Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini untuk melakukan uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan scatter plot. Apabila setelah dilakukan uji scatter plot diperoleh letak datanya menyebar, maka data tersebut dapat disimpulkan terbebas dari uji heterokedastisitas.

Berdasarkan uji scatter plot diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar2.

Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data Olahan SPSS 2015

Uji Goodness of Fit

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat

bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Jika model signifikan maka model bisa digunakan untuk prediksi atau peramalan, sebaliknya jika non/tidak signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan.

Tabel 7.
Uji Goodness of Fit

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1469.720	3	489.907	31.713	.000 ^b
	Residual	1483.030	96	15.448		
	Total	2952.750	99			

Sumber: Data olahan SPSS 2015

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 31.713 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Artinya model dalam penelitian ini sudah fit dan bisa digunakan untuk mem-prediksi dan dapat dilakukan peng-ujian hipotesis untuk masing-masing variabel.

Pengujian Hipotesis Regresi Linear Berganda

Tabel 8.
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	51.444	3.709		13.870	.000
	Gender	6.966	.819	.639	8.509	.000
	Pemahaman Pajak	-.123	.057	-.158	-2.163	.033
	Religiusitas	1.383	.876	-.119	-1.579	.118

Sumber: Data Olahan SPSS 2015

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Uji Parsial untuk variabel gender dari tabel 8, dapat dilihat bahwa hasil dari nilai t hitung variabel gender sebesar 8.509, dimana hasil ini lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.984, yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gender terhadap persepsi penggelapan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikannya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

2. Uji Parsial untuk variabel sistem pengendalian intern dari tabel 8, dapat dilihat bahwa hasil dari nilai t hitung untuk pemahaman perpajakan sebesar 2.163, dimana hasil ini lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.984, yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. Hal ini juga ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0,033 lebih kecil dari 0,05.

3. Uji Parsial untuk variabel religiusitas. Dari tabel 8, dapat dilihat bahwa hasil dari nilai t hitung untuk variabel religiusitas sebesar 1.579, dimana hasil ini lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.984, yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara religiusitas dengan persepsi penggelapan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0.188 lebih besar dari 0.05.

Pembahasan hasil hipotesis pertama

Uji hipotesis untuk variabel *gender*, dapat dilihat bahwa hasil dari nilai t hitung variabel gender sebesar 8.509, dimana hasil ini lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.984, yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gender terhadap persepsi penggelapan pajak.

Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikannya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis antara variabel gender dengan persepsi penggelapan pajak diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara perbedaan gender terhadap persepsi penggelapan pajak. sehingga H_1 diterima.

Pembahasan hasil hipotesis kedua

Uji hipotesis untuk variabel pemahaman perpajakan, dapat dilihat bahwa hasil dari nilai t hitung untuk pemahaman perpajakan sebesar 2.163, dimana hasil ini lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.984, yang artinya bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. Hal ini juga ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0,033 lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis antara pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. sehingga H_2 diterima. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka tingkat persepsi penggelapan pajak menurun, karena penggelapan perpajakan dianggap tidak etis.

Pembahasan hasil hipotesis ketiga

Uji hipotesis untuk variabel religiusitas, dapat dilihat bahwa hasil dari nilai t hitung untuk variabel religiusitas sebesar 1.579, dimana hasil ini lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.984, yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh antara religiusitas dengan persepsi penggelapan pajak. Hal ini ditunjukkan

dengan tingkat signifikan sebesar 0.188 lebih besar dari 0.05.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis antara religiusitas dengan persepsi penggelapan pajak, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak sehingga H_3 ditolak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9.
Hasil Uji koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.706 ^a	.498	.482	3.930

Sumber: Data Olahan SPSS 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai dari Adjusted R Square sebesar 0.482, artinya sebesar 48.2% variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 48.2% persepsi penggelapan pajak dipengaruhi oleh variabel gender, pemahaman perpajakan, dan religiusitas. Sedangkan sisanya sebesar 51.8% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam model penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perbedaan gender mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Dengan nilai t

sebesar 8.509, yang artinya $t_{hit} > t_{tabel}$ (1,984). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gender mempengaruhi secara signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Dari hasil kuesioner yang disebarkan menyatakan rata-rata dari jumlah laki-laki 50,24528 sedangkan perempuan 42,52273 dimana rata-rata dari skor nilai yang diberikan oleh responden laki-laki sebesar 3,35 sedangkan perempuan sebesar 2,83. Hasil ini memperlihatkan bahwa perempuan akan lebih menentang penggelapan pajak dibandingkan laki-laki.

2. Pemahaman perpajakan mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Dengan nilai $t_{hit} > t_{tabel}$ (1,984), namun dengan arah koefisien negatif. Artinya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi secara signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka persepsi penggelapan pajak semakin rendah.
3. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Dikarenakan $t_{hit} < t_{tabel}$ yaitu $1.579 < 1.984$.

Saran

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang memungkinkan dapat mempengaruhi persepsi penggelapan.
2. Selain melakukan penyebaran kuesioner, metode wawancara dapat dilaksanakan untuk penelitian selanjutnya atau dengan memberikan kolom jawaban tambahan dalam kuesioner sehingga responden dapat menambah atau memberikan argumen tambahan mengenai pernyataan yang diberikan.
3. Penambahan jumlah sampel akan sangat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah sampel tiap kelompok yang diteliti atau dengan cara memperluas wilayah penelitian sehingga tidak hanya dilakukan di wilayah Universitas Gadjah Mada. Penambahan jumlah sampel ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan generalisasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Yessi Mutia. 2014. Efek Moderasi Religiusitas Dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) Dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*). SNA XVII Mataram, Lombok.
- Coate, C and Frey, K. 2000. "Some Evidence on the Ethical Disposition of Accounting Students : Context and

- Gender Implications*". *Teaching Business Ethics*. Vol 4 No 4, pp 379-404
- Greetz, Clifford. 1993. "*Religion as a Cultural System*". PP 87-125. Fontana Press.
- Izza, Nur Ika Alfi dan Ardi Hamzah. 2008. "*Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: sebuah Studi Interpretatif*". Surabaya.
- Mardiasmo. 2009. "*Perpajakan Edisi Revisi 2009*". Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. "*Pengaruh Tax Avoidence Terhadap Cost of Debt*". PPJK 20, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- McDaniel, S. W., & Burnett, J. J. 1990. Consumer religiosity and retail store evaluative criteria. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 18(2), 101-112.
- McGee, R.W., Simon dan Annie. 2008. "*A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States*", *Journal of Business Ethics* 2008, pp. 147-158.
- McGee, R.W., Zhiwen Guo. 2007. "*A survey of law, business and philosophy students in China on the ethics of tax evasion*", *Journal of Business Ethics* 2007, Volume Vol. 2 No. 3, 2007, pp. 299-315
- Rahman, Irma Suryani. 2013. "*Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)*". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Resmi, Siti. 2009. "*Perpajakan Teori dan Kasus*", Jakarta, Salemba Empat.
- Salsabila, Ania. Hepi Prayudiawan. 2011. *Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Audit dan Gender Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol 4. No. 1 (155-175)
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. "*Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*". Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada.
- Tang, T. L. P. 2002. Is the love of money the root of all evil? Or different strokes for different folks: lessons in 12 countries. *Paper presented to the International Conference on Business Ethics in the Knowledge Economy*. Hong Kong, China.